

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketika undang-undang tersebut ditetapkan, hal ini menjadi titik balik reformasi keuangan Republik Indonesia. Serta ketika menyusun anggaran harus didasarkan pada kinerja, sehingga menunjukkan dasar pentingnya kelembagaan Monev untuk kebutuhan penilaian kinerja.

Casley & Kumar (1987, dikutip dalam Irwan Suliantoro, 2020) menyatakan bahwa monitoring termasuk dalam fungsi berkelanjutan yang menggunakan teknik pengumpulan data sistematis mengenai suatu indikator tertentu untuk menunjukkan pihak manajemen terhadap indikasi sejauh mana pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana (sumber daya) yang dialokasikan. Rubio (2011, dikutip dalam Irwan Suliantoro, 2020) menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis informasi atau data dengan cara yang sistematis untuk menghasilkan umpan balik yang relevan dalam perumusan

kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 195 /PMK.05/2018 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L adalah suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi dalam rangka untuk mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada K/L. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mencakup Spending Review dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA).

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan sebuah reviu atau tinjauan pelaksanaan anggaran dana untuk menunjukkan kinerja yang telah dilaksanakan di sektor masing-masing baik tingkat daerah maupun pusat. Reviu atau tinjauan mengenai belanja atau pengeluaran pemerintah pusat khususnya dari kualitas belanja (value for money) yang menghasilkan masukan atau saran mengenai perumusan kebijakan dalam penganggaran pada peningkatan kualitas belanja negara disebut spending review. Pengukuran Kinerja dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan suatu indikator atau alat pengukuran yang disahkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur dan menilai kualitas kinerja dalam pelaksanaan anggaran belanja suatu kementerian negara atau lembaga khususnya dari sisi kesesuaiannya dan ketepatannya mulai dari perencanaan, efektivitas, pelaksanaan, efisiensi, dan kepatuhannya pada regulasi.

Asas akuntabilitas merupakan salah satu dari asas-asas penyelenggaraan good governance menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan bahwa setiap kegiatan atau program yang diselenggarakan negara beserta hasil akhir yang dicapainya itu harus

dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang mana merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pada pelaksanaan RPA asas akuntabilitas tersebut diwujudkan dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan kinerja disusun atas tindaklanjut dari pelaksanaan performance based budgeting. Pada belanja di Kementerian atau Lembaga ada beberapa sistem Monev yang fungsinya memiliki kesamaan, antara lain Spending Review (Ditjen Anggaran), Reviu Pelaksanaan Anggaran (Ditjen Perbendaharaan), dan eMonev (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) (Suliantoro, 2020)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis hendak melakukan analisis terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Penulisan ini berfokus terhadap analisis indikator-indikator yang ada pada IKPA dan Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul Tinjauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Kinerja (IKPA) dan pada KPPN Yogyakarta Sebagai Satuan Kerja tahun 2018-2020

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini, meliputi:

1. Bagaimana perkembangan nilai IKPA pada KPPN Yogyakarta Sebagai Satuan Kerja tahun 2018-2020 ?
2. Apa saja kendala yang timbul ketika evaluasi IKPA pada KPPN Yogyakarta sebagai Satuan Kerja tahun 2018-2020 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya Tulis ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, meliputi:

1. Mengetahui capaian kinerja melalui nilai IKPA pada KPPN Yogyakarta Sebagai Satuan Kerja Tahun 2018-2020
2. Mengetahui kendala yang muncul ketika melakukan evaluasi capaian IKPA pada KPPN Yogyakarta Sebagai Satuan Kerja Tahun 2018-2020

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini berfokus pada tinjauan atas implementasi IKPA pada KPPN Yogyakarta tahun 2018-2020 sebagai Satker (Satuan Kerja). Penyusunan akan dilakukan dengan menjabarkan data-data dan fakta mengenai nilai setiap indikator IKPA serta kendala pada saat dilakukan evaluasi capaian kinerja pada KPPN Yogyakarta. Dengan data dan tinjauan yang ada penulis akan membandingkan nilai IKPA tahun 2018-2020 guna untuk mendapatkan kesimpulan atas kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Penyusunan karya tulis ini diharapkan akan memberikan sebuah pandangan maupun masukan terkait implementasi IKPA pada Satker yang bersangkutan yakni KPPN Yogyakarta sehingga kinerja pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal di kemudian hari.

2. Dapat menambah wawasan serta sarana informasi bagi pembaca lainnya mengenai monitoring evaluasi anggaran terkait pengimplementasian IKPA pada KPPN Yogyakarta

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum dari KTTA yang disusun. Yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisa, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan sebuah landasan teori yang relevan dengan topik yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun. Teori yang dijelaskan berupa konsep monitoring dan evaluasi anggaran, konsep dasar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode dalam mengumpulkan data, gambaran umum yang meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi objek penulisan yaitu KPPN Yogyakarta, dan pembahasan hasil. Lalu pada bab ini juga dijelaskan mengenai hasil nilai IKPA KPPN Yogyakarta pada tahun 2018-2020 yang diikuti dengan pembahasan tentang implementasinya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai usulan terhadap perbaikan pada masa yang akan mendatang untuk meningkatkan perolehan nilai IKPA